BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi sekarang maraknya aksi kejahatan di media sosial atau *cybercrime*, kejahatan ini seharusnya menjadi sorotan utama bagi setiap negara. *Cybercrime* di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan secara detail tentang apa saja yang termasuk dalam dari tindak pidana *cybercrime*. Seiring dengan banyak terjadinya kasus *cybercrime* perlu adanya penegakan hukum yang tegas.

Akhir-akhir ini banyak sekali kasus kejahatan yang terjadi dimedia sosial salah satunya adalah kasus prostitusi *online*. Prostitusi *online* adalah kegiatan prostitusi yang menjadikan, dimana seseorang sebagai objek untuk diperjualbelikan melalui media elektronik atau *online*, media yang sering digunakan seperti *Twitter, Mi Chat, Instagram, Whatsapp, dan Facebook*.¹ Maraknya kasus prostitusi *online* ini tidak terlepas dari beberapa faktor seperti faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sekitar, sosial budaya, dan biologis atau seksual.

Prostitusi *online* di atur di dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

¹ Venny Humairah, 2016, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2. <https://media.neliti.com/media/publications/184068-ID-none.pdf> (diakses pada tanggal 04 Oktober 2021)

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang merumuskan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Masalah prostitusi *online* merupakan masalah yang rumit, oleh karena itu masalah ini sangat perlu mendapat perhatian khusus oleh aparat penegak hukum. Direktorat Reserse Kriminal Khusus merupakan bagian dari kepolisian, bertugas melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional dan penyelenggaraan penyidikan, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. salah satu Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur di dalam Pasal 13 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merumuskan: “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Aparat kepolisian diharapkan dapat mengembalikan norma- norma hukum yang dijadikan pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat, Anggota Siber Ditreskrimsus Polda Sumbar telah melakukan upaya represif terhadap terdakwa AS. Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wib, yang berlokasi di Kyriad Hotel Bumiminang saksi NR yang telah melakukan tindak pidana prostitusi *online*, hal ini berawal dari

laporan dari masyarakat yaitu AR yang merupakan seorang anggota DPR RI yang menyampaikan bahwa telah terjadi praktek prostitusi *online* di Kota Padang, lalu saksi RH diminta oleh pihak Kepolisian menginstal aplikasi *Mi Chat* di *Handphonenya* dan mendapatkan target akun *Mi Chat* atas nama “Tari”, selanjutnya saksi RH bersama dengan Tim Siber Polda Sumbar Melakukan *Chattingan* dengan akun *Mi Chat* “Tari” dan saksi RA beserta saksi lainnya meninggalkan saksi RH dan tim cyber Polda Sumbar untuk mengikuti rapat, selanjutnya dari hasil *chattingan* saksi RH, selanjutnya akun *mi chat* “Tari” mengirimkan gambar-gambar cewek yang berbusana vulgar dan pemilik akun *mi Chat* “Tari” dan menawarkan cewek-cewek tersebut dengan tarif Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), terdakwa AS berperan sebagai orang yang menawarkan jasa layanan *sex* (Mucikari) yang akan dilakukan oleh saksi NP. Dan saksi NP nantinya akan memerikan imbalan kepada terdakwa AS apabila jasa layanan *sex* tersebut berhasil. Selanjutnya perbuatan AS diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Berdasarkan dari semua yang telah terpaparkan di atas maka penulis membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Direktorat Recerse Kriminal Khusus Polisi Daerah Sumatera**

Barat Dalam Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Media *Online*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk mengarahkan proses penelitian dan penulisan, penulis perlu merumuskan masalah yang harus dibahas dan ditemukan jawabannya :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum yang dilakukan oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Sumatera Barat dalam tindak pidana prostitusi dengan menggunakan media *online*?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Sumatera Barat dalam menyelesaikan kasus prostitusi dengan menggunakan media *online*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Penegakan Hukum yang dilakukan oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Sumatera Barat dalam tindak pidana prostitusi dengan Menggunakan media *online*.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Sumatera Barat dalam menghadapi kasus prostitusi dengan menggunakan media *online*.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat suatu realita hukum dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai pendukung untuk mengidentifikasi dan memperjelas temuan bahan non-hukum untuk tujuan penelitian atau penulisan hukum.² Atau dengan kata lain, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap situasi atau kondisi nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan, setelah data yang diperlukan terkumpul kemudian mengarah pada identifikasi masalah yang pada akhirnya mengarah pada penyelesaian masalah..³

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.⁴

Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara dengan 5

² Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

³ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

⁴ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

orang anggota Polisi Daerah Sumatera Barat yang pernah menangani kasus prostitusi *online*, yaitu:

- 1) Bapak Arie S, Nugroho, SIK, MH.,
- 2) Bapak Akp Yahya Novi, S, SH.,
- 3) Bapak Akp Budy Rilvantino, SDS. MH
- 4) Bapak Aipda Reky Marten, SH.,
- 5) Bapak Briptu Yogie Rusyadi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup dokumen- dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya untuk mendapatkan bahan- bahan hukum, yaitu : Data Berita Acara Pidana dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar Tentang Prostitusi *Online* dari tahun 2020.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, tatap muka antara penanya atau pewawancara dan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang disebut pedoman wawancara (*interview guide*).⁵ Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, yaitu sebelum wawancara dilakukan daftar pertanyaan yang telah

⁵ Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53

disiapkan dan dapat dikembangkan pada saat wawancara dengan informan resmi sesuai dengan masalah yang dibahas.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan terkait, arsip, catatan, dokumen resmi dan sebagainya.⁶

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan data primer dan data sekunder. Uraian tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dijadikan acuan dalam memecahkan masalah hukum yang menjadi objek kajiannya, pola-pola tersebut dianalisis kembali dengan menggunakan teori objektif.⁷

⁶ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, RinekaCipta, Jakarta, hlm. 206

⁷ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.